

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN SIGI

Andi Nurpaída¹, Muslimin dan Abdul Kahar²

andi.nurpaída81@gmail.com

¹*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

²*Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

Abstract

The study intends to determine the influence of the application of governmental accounting standards and internal audit on the quality of financial statement of governmental working units (SKPD) in Sigi District. It is a quantitative study with survey approach to answer hypotheses with statistical technique with the test conducted on 27 units of local government units by selecting 54 respondents consisting of budget users and officials of financial administration in SKPD of Sigi District. Data Collected by questionnaires. The result finds that the application of government accounting standards and internal audit simultaneously and partially have positive and significant influence on the quality of financial statements of SKPD Sigi. This means that when the government accounting standards and internal audit applied well, then the quality of the financial statements will also be better.

Keywords: *the application of government accounting standards, internal audit, and the quality of financial statement*

Disetiap Negara membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan bentuk keberhasilan dalam membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Keuangan Negara dapat didefinisikan dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Keuangan Negara dalam arti sempit hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas umum Negara selama satu tahun anggaran, sedangkan dalam arti yang luas Keuangan Negara atau Daerah menurut Undang-Undang RI No 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan tidak hanya memperhatikan kepentingan satu tahun anggaran tetapi menggunakan perspektif waktu jangka panjang, pada tingkat daerah, pengertian diatas diadopsi dalam PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 butir (5) bahwa keuangan daerah adalah "semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu Komite Standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka mengemban amanat Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 yang menetapkan basis akrual, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sejak Tahun 2006 KSAP telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draf Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP, Sehingga standar akuntansi pemerintahan diterapkan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut sekarang ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, sebagai mandat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintahan, akan memberikan dampak yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi sistem akuntansi adalah perubahan basis akuntansi. Basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP No. 1 Paragraf 8). Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 adalah basis kas menuju akrual (Cash Toward Accrual) adalah penggunaan basis kas menuju akrual merupakan proses transisi dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan kas, sedangkan asset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan pada saat transaksi penyusunan laporan keuangan.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang dimaksud SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun kebijakan akuntansi paling lambat tahun 2014 sedangkan penerapan SAP berbasis akrual tersebut akan diberlakukan pada tahun 2015.

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Memperhatikan sifatnya yang strategis penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih baik dari proses penganggaran, penatausahaan maupun

pelaporan. Praktek selama ini menunjukkan kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali seluruh isi SAP dan menimbulkan infisiensi karena adanya pengulangan (*redundancy*) antara SAP yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP lalu mengembangkan metode baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya, pencatatan arus transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang harus disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan yang menggunakan basis kas yakni untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan sebagian lagi menggunakan basis akrual yakni pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas. Pengertian dari basis kas adalah suatu transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan dicatat apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran mengharuskan pembaharuan dalam manajemen keuangan daerah mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Tahun 1981 sebelum

bergulirnya otonomi daerah, pertanggung jawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah hanya berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan, sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Manual Adminstrasi Keuangan Daerah (MAKUDA).

Tata kelola keuangan daerah yang baik memerlukan suatu sistem pengelolaan akuntansi keuangan daerah yang diikuti dengan pengawasan baik internal maupun eksternal. Hal ini diharapkan akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang baik didaerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan ada 4 prasyarat yang dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diharapkan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sigi survai pendahuluan dilakukan pada SKPD diperoleh keterangan bahwa implementasi akuntansi keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan disetiap SKPD Kabupaten Sigi membantu pemerintah daerah baik eksekutif, legislatif untuk mengadakan perencanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap keuangan daerah, oleh karena itu disetiap SKPD penerapan akuntansi telah dimulai dengan melakukan neraca awal, pemberian kode akun, pencatatan akuntansi (jurnal, posting, dan laporan keuangan) yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sebagai pertanggung jawaban Bupati. Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur laporan keuangan untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum laporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya.

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintahan daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Propinsi Kabupaten/Kota.

Keuangan pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Salah satu upaya kongrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.

Untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan SAP, kepala daerah sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara ditingkat daerah baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menetapkan suatu kebijakan umum dibidang akuntansi.

Internal audit tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian mengenai internal audit telah dilakukan oleh Sari dan Raharja (2011) namun menguji pengaruh internal audit terhadap mekanisme *Good Corporate Governance*, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh internal audit terhadap mekanisme GCG. Demikian pula halnya dengan internal audit diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim audit inspektorat

maupun BPKP propinsi masih ditemukan adanya kejanggalan pada instansi tertentu, contohnya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pemahaman pegawai yang masih terbatas tentang sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta pembagian tugas yang tidak jelas, disebabkan mereka belum memahami tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan sudah terbiasa dengan sistem atau pola lama yang dilakukan selama ini, kondisi tersebut dapat mempengaruhi laporan keuangan SKPD Kabupaten Sigi.

Pemaparan dilakukannya penelitian ini karena 1). masih adanya kesenjangan (*research gap*) pada penelitian sebelumnya; 2). Penelitian ini mengambil lokasi pada SKPD Kabupaten Sigi karena tahun 2013 sampai tahun 2015 memperoleh Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten sigi atas laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, hal ini menunjukkan bahwa proses reviw laporan keuangan sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pemeriksaan. Berdasarkan audit BPK sejak tahun 2013-2015, opini yang diberikan BPK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tidak mengalami peningkatan. Adapun hasil audit BPK kabupaten sigi dapat dilihat pada

Tabel 1. Hasil Audit BPK Kabupaten Sigi Tahun 2013-2015

No	Uraian	Opini LHP BPK
1.	Audit BPK Tahun 2013	WDP
2.	Audit BPK Tahun 2014	WDP
3.	Audit BPK Tahun 2015	WDP

Sumber. DPPKAD Kabupaten Sigi 2016

Hasil Opini Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sigi karena adanya pengawasan kas daerah belum memadai, penatausahaan keuangan dan pencatatan atas asset tetap yang belum memadai sebesar nilai wajar dan tidak didukung dengan daftar lengkap yang memadai, pengendalian belanja bantuan keuangan ADD dan DD dan BOD belum memadai, sehingga temuan terulang setiap tahunnya dan Pemerintah Kabupaten Sigi belum mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara memadai. Sehingga laporan keuangan Kabupaten Sigi selama tiga tahun terakhir masih jauh dari harapan pemerintah daerah dan masyarakat, motivasi tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti, artinya bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Sigi mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah penerapan standar akuntansi Pemerintahan dan internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sigi?. 2). Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sigi?. 3). Apakah internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sigi?

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi Pemerintahan dan internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sigi. 2). Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sigi. 3). Untuk mengetahui internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sigi.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sigi.

Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dengan jumlah 42 SKPD. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan karakteristik variabel dependen (Y) membutuhkan responden yang memiliki pengalaman dalam membuat laporan keuangan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Merupakan Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD
- Merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD

Berdasarkan kriteria sampel di atas maka jumlah sampel terpilih yaitu sebanyak 54 orang.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi linier berganda untuk tiga variabel independen yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
 a_0 = Konstanta, nilai Y ketika X = 0
 b_1 = angka koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintahan
 b_2 = angka koefisien regresi Internal Audit
 X_1 = Standar Akuntansi Pemerintahan
 X_2 = Internal Audit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas (kesahihan) terhadap kuesioner yang

digunakan dalam penelitian ini maka diketahui nilai kesahihan dari 9 pernyataan variabel Standar akuntansi pemerintahan (X_1), 7 pernyataan internal audit (X_2), 10 pernyataan variabel kualitas laporan keuangan (Y) maka dapat dinyatakan layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena nilai r hitung yang diperoleh r kritis $> 0,3$.

2. Hasil Uji Reliabilitas

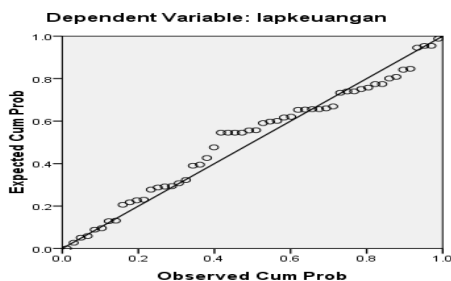
Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh indikator variabel standar akuntansi pemerintahan dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dapat dikatakan memenuhi syarat reliabel, karena nilai koefisien *Cronbach's Alpha* seluruh instrumen variabel independen dan dependen lebih besar dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



grafik 1 Hasil Uji Normalitas

Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa nilai sebaran data penelitian terlekat di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas dapat dipenuhi sehingga dapat digunakan untuk metode analisis selanjutnya.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas terhadap variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

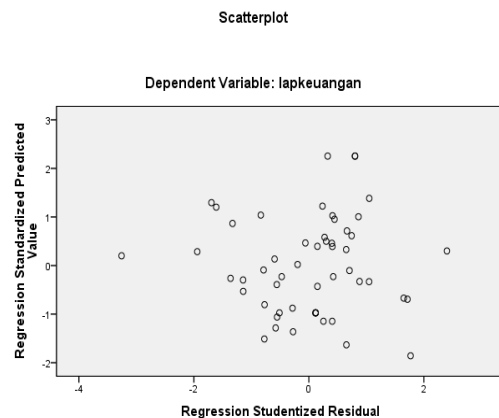
No	Variabel Independen	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1)	0,722	1.386
2	Internal Audit (X_2)	0,722	1.386

Sumber : Lampiran Hasil Regresi 2017

Tabel 1 di atas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10, dan nilai *variance inflation* (VIF) yang lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas terhadap variabel independen adalah sebagai berikut:



Grafik 2. Regresi Standardized predicted value

Grafik 2 di atas memperlihatkan bahwa nilai sebaran data penelitian tersebar secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y sehingga berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, model regresi layak untuk digunakan.

Hasil Analisis Data

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.809	.449		1.809	0.078
1 X1	.391	.137	.809	0.371	0.006
X2	.388	.150	.371	0.336	0.012
a. Dependent Variable: Y					
R = 0,618 a		F statistic = 15.75			
R Square = 0,382		Sig.f = 0,000			
Adjusted R Square = 0,358					

Sumber : Data primer yang diolah

Mengacu pada tabel 2 di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,809 + 0,391X_1 + 0,388X_2$$

Persamaan regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X_1 , dan X_2) memberi pengaruh terhadap variabel independen (Y) model analisis regresi kualitas laporan keuangan SKPD

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (uji F)

Hasil uji simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 15,750 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti secara simultan seluruh variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten sigi berdasarkan hasil uji F ternyata terbukti.

2. Uji Partial (uji t)

a. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Nilai t_{hitung} sebesar 0,371 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,006 < \alpha 0,05$ pada taraf kepercayaan 95% memberikan arti bahwa Hipotesis kedua secara partial penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan SKPD kabupaten sigi, berdasarkan hasil uji t ternyata terbukti.

b. Variabel intrnal audit

Nilai t_{hitung} internal audit sebesar 0,336 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,012 < \alpha 0,05$ memberikan arti bahwa secara partial internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten sigi, berdasarkan hasil uji t ternyata terbukti.

3. Koefisien Determinasi

Hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai R-Square = 0,382 atau = 38,2%. Hal ini berarti bahwa sebesar 38,2% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, 61,8 % selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai R-Square = 0,382 atau = 38,2%. Hal ini berarti bahwa sebesar 38,2% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, dan selebihnya 61,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi

Hasil penyebaran instrument menyatakan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten sigi

Hasil penelitian ini mendukung Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah Daerah, sebagai mandat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akan memberikan dampak yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan mendasar yang mempengaruhi sistem akuntansi adalah perubahan basis akuntansi. Basis akuntansi yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah basis kas menuju akrual (*Cash toward accrual*), sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akuntansi adalah akrual. *Basis cash toward accrual* adalah penggunaan basis kas dan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini cukup konsisten dengan beberapa peneliti terdahulu Kartika (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Melalui uji F diketahui bahwa Penerapan SAP dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten sigi. Hasil penelitian ini memberi nilai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa implementasi dalam bentuk penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan menyajikan komponen pokok laporan keuangan yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Azlim. dkk (2012) Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

Semakin baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 2005 (2005:1) adalah standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan dengan ditetapkannya PP Nomor 71 tahun 2010 diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan.

Kartika (2013) Untuk memperoleh bukti bahwa pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan juga dipengaruhi secara langsung oleh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Melalui uji F diketahui bahwa Penerapan SAP dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Pengaruh Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel internal audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten sigi. Hasil penelitian ini memberi nilai pengaruh internal audit terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa Prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, pimpinan SKPD menempatkan pegawai yang mempunyai kompetensi dan jujur agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pimpinan selalu memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Setiap transaksi diotorisasi berdasarkan aktifitas yang tepat serta bekerja menggunakan faktur dan formulir yang bernomor urut cetak. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan keuangan daerah secara optimal.

Purwanti (2008) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan Se-Wilayah Kota Bandung secara simultan dan secara parsial. Hasil penelitian deskriptif menunjukkan dalam pengujian hipotesis secara parsial variabel bebas yang diuji yakni melalui uji t dengan uji dua pihak pada taraf $\alpha = 5\%$.

Pimpinan SKPD senantiasa menempatkan pegawai sesuai dengan bidang keahliannya, agar supaya tugas yang

diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Mematuhi kebijakan pimpinan yang telah disepakati bersama serta mengadakan pengecekan terhadap aktivitas yang terjadi.

Tugiman (2006:11) Internal audit merupakan suatu fungsi penilaian independen didalam entitas/organisasi guna menguji serta mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan. Internal audit bertujuan untuk membantu anggota entitas organisasi supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Internal Audit akan menganalisis, mengajukan beberapa saran dan penilaian. pemeriksaan juga mencakup pengawasan efektif dengan biaya yang wajar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Internal Audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Sigi. hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sigi.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
3. Internal Audit berpengaruh secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh yang paling rendah

dalam penelitian ini sehingga hendaknya harus ditingkatkan melalui diklat, pelatihan yang diikuti. Semakin banyak diklat, pelatihan yang diikuti maka semakin banyak pengetahuan dan pemahaman serta memiliki wawasan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan

2. Internal Audit mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam penelitian ini hendaknya harus dipertahankan melalui pengalaman, pelatihan dan pendidikan
3. Untuk dapat menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup seluruh pengelola keuangan yang ada pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
4. Untuk dapat menambahkan beberapa variabel independen dan dependen sehingga terkait dengan penelitian selanjutnya agar hasil yang dicapai lebih baik lagi dan diharapkan untuk dapat melakukan pengujian terhadap variabel-variabel independen lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yang dapat memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh yang paling rendah dalam penelitian ini sehingga hendaknya harus ditingkatkan melalui diklat, pelatihan yang diikuti. Semakin banyak sdiklat, pelatihan yang diikuti maka semakin banyak pengetahuan dan pemahaman serta memiliki wawasan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan
6. Internal Audit mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam penelitian ini hendaknya harus dipertahankan melalui pengalaman, pelatihan dan pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan, saran dan tanggapan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Muslimin, S.E., M.M sebagai Pembimbing Ketua dan Dr. Abdul Kahar, S.E., M.Si., Ak., C.A., sebagai Pembimbing Anggota yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan perhatian dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Azlim. dkk (2012) Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*
- Daniel, Kartika (2013) Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*
- Balango, Anwar (2009) Pengaruh Penerapan akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (survey pada Prov Sulteng). *Tesis Magister Manajemen Universitas Tadulako*
- Meilani Purwanti (2008) Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Koperasi Pegawai republik Indonesia Kota Bandung)
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. (2003) *Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Bastian, Indra (2014) *audit Sektor Publik Pemeriksaan pertanggungjawaban Pemerintahan*, Penerbit salembah Empat, Jakarta
- Darmawan (2014) *Metodologi Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

- Erlina (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual* (Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 dan Permendagri No 64 tahun 2013. Salemba Empat.
- Ghozali, Imam (2006) *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan Program IBM SPSS 19, Badan Penerbit Universitas Ponegoro, Semarang.
- Kumaat, G Valery (2011) *Internal audit*, penerbit Erlangga Jakarta
- Rahayu, Suhayati Ely, (2013) *Auditing*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Riduwan (2010) *Skala Pengukuran variabel-variabel penelitian*, Alfabeta, Jawa Barat
- Sunyoto, Danang (2014) *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*, penerbit PT Buku Seru Jakarta.
- Tugiman, Hiro (2000) *Pengenalan internal audit*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerinthan berbasis akrual
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah,